



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

Jln. Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Sofifi, Maluku Utara 97852
(0921) 31328572, 3124298, website: www.pt-malukuutara.go.id, email: ptsp.ptmalut@gmail.com

Sofifi, 7 Januari 2024

Nomor : 115 /KPT.W28-U/OT.01/1/2024
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi

Kepada Yth.

Sekretaris Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat
di-
Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/SK/VIII/2022 Tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan tanggal 30 Agustus 2022, Maka bersama ini kami kirimkan laporan tahunan pertanggung jawaban pelayanan informasi periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Demikian laporan ini disampaikan atas perhatiannya dan diucapkan terimakasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H.



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Jln. Bhayangkara, Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan
Tlp/Fax. K : (0921) 3128572, P : 3124298

Website : www.pt-malukuutara.go.id / Email : ptsp.ptmalut@gmail.com.

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2023

A. RINGKASAN LAPORAN

Dalam rangka Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat peradilan dibawahnya. Untuk itu dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan sistem informasi Pengadilan yang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi menjadi tolak ukur bagi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam menjalankan pelayanan informasi. Maka dari itu, meja informasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan, karena dengan adanya meja informasi menjadi tolak ukur keterbukaan informasi di lingkup Peradilan. Tujuan dibentuknya Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah untuk sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, untuk itu sesuai dengan moto Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah pelayanan yang cepat dan transparan maka Pengadilan Tinggi berkomitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dengan optimal dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan aparat Peradilan sehingga fisi dan misi lembaga Peradilan dapat terwujud.

B. GAMBAR UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Meja informasi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI dan menjadi panutan atas Peradilan yang berada dibawahnya, Pengadilan Tinggi Maluku Utara memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam pelayanan informasi, diantaranya :

- a. Seperangkat computer yang terhubung dengan jaringan
- b. Formulir dan buku register informasi
- c. TV LCD
- d. Meja dan kursi
- e. Alat tulis
- f. Ruang Informasi Publik
- g. Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan meja informasi lainnya

2. Sumber Daya Manusia

Dalam proses pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor W28-U/1292/KP/XI/2021 Tanggal 17 November 2021, Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai berikut :

- a. S2 Hukum
- b. S1 Hukum
- c. D3 Komputer

3. Anggaran

Adapun anggaran dan pelayanan informasi masih menggunakan anggaran dari DIPA Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaan, seperti pengembangan teknologi informasi perkara, pembuatan standar prosedur pelayanan keterbukaan informasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, percetakan dan pengandaan formulir permohonan informasi dan berkas.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan *	Waktu Rata-rata Pelayanan **	Jumlah Permohonan Yang Dikabulakan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	Nihil	1 hari	-		-	-	-	-
Kepegawaian	10	1 hari	10		-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	Nihil	-	-		-	-	-	-
Anggaran & Aset	nihil	1 hari	-		-	-	-	-
Lainnya	2	1 hari	2		-	-	-	-
Total****	12	-	12		-	-	-	-

- * Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan.
- ** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak).
- *** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses public namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (missal masih diketik), atau alasan lain.
- **** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan **		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
Total****	Nihil	-	-	-	-	-	-	-

- * Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID
- ** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan informasi
- *** Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
- **** Diisi dengan jumlah proses mediasi di komisi informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal
- ***** Diisi dengan jumlah putusan komisi informasi yang menguatkan tanggapan atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan pemohon informasi.
- ***** Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Adapun kendala yang ada di Pengadilan Tinggi Maluku Utara terkait dengan pelayanan informasi adalah

1. Belum ada pelatihan khusus tersendiri untuk meja informasi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Adapun rencana dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap petuga informasi.

Sofifi, 7 Januari 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Muhammad Ikbal Daud, S.H.